



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI**

(Bidang : Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kependudukan)

Tahun Sidang	: 2023-2024
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 29 (dua puluh sembilan)
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Rabu, 27 Septmber 2023
Waktu	: Pukul 10.26 WIB – selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Acara	: - Tindak lanjut arahan Presiden terkait Pembenahan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan PMI sesuai UU PPMI. - Pejelasan capaian peningkatan kesempatan dan ketrampilan kerja pada BLKLN, BBPVP dan BLK komunitas - Penjelasan kepastian pelindungan kesejahteraan sosial bagi pekerja sebagaimana diatur dalam Perpres No.36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024
Ketua Rapat	: Emanuel Melkiades Laka Lena/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Ida Nuryati, S.Sos., M.A./Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
Hadir	: A. Menteri Ketenagakerjaan RI: Dr. Hj. Ida Fauziyah, M.Si., beserta jajaran; B. 25 dari jumlah 49 Anggota Komisi IX DPR RI.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dibuka pukul 10.26 WIB., sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat telah memenuhi kuorum dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI, untuk:
 - a. melakukan perbaikan secara aktif tata kelola penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari hulu sampai ke hilir;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan penempatan, dan mempermudah prosedur penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri;
 - c. mengambil langkah konkrit dalam memenuhi peluang kesempatan kerja luar negeri termasuk pekerja musiman;
 - d. membuat terobosan bersama Kementerian dan Lembaga terkait untuk memberikan kemudahan akses pelatihan, perizinan, penempatan, pelindungan dan pengawasan Pekerja Migran Indonesia (PMI);

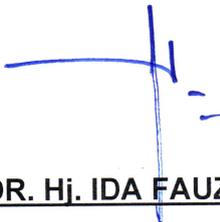
- e. melakukan kolaborasi dengan pihak terkait dalam maupun luar negeri dalam rangka memperluas kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI),
 - f. mengoptimalkan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Balai Latihan Kerja (BLK), Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) untuk meningkatkan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI).
2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk melakukan percepatan implementasi regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
 3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait, dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
 4. Komisi IX DPR RI meminta jawaban tertulis atas pertanyaan yang disampaikan oleh anggota DPR RI pada Rapat Kerja hari ini paling lambat tanggal 4 Oktober 2023.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.06 WIB.

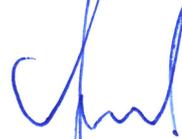
Jakarta, 27 September 2023

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI,



DR. Hj. IDA FAUZIYAH, M.Si

KETUA RAPAT/
WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI,



EMANUEL MELKIADES LAKA LENA